



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

**RANCANGAN AKHIR
RENJA-PD
2024
KECAMATAN
MUARA WIS**

**Jl. Patin No. 33 RT. 08
Muara Wis**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas kasih dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Wis Tahun 2024.

Keberadaan rencana kerja ini merupakan suatu langkah awal bagi Kecamatan Muara Wis dalam rangka mewujudkan tujuan Kecamatan Muara Wis yaitu **"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel"**.

Diharapkan rencana kerja ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam setiap pengambilan langkah maupun kebijakan Kecamatan Muara Wis. Dengan demikian akan terciptakan keterpaduan dan kesinambungan dalam pelaksanaan program – program kerja guna tercapainya visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di masa mendatang, sangat diharapkan pula masukan dan sasaran perbaikan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan rencana kinerja periode selanjutnya.

Akhir kata, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Wis Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik kami harapkan untuk penyempurnaan ke depannya.

Muara Wis, Agustus 2023
Camat Muara Wis

FADHLI ANNUR, S.Pd
NIP. 19710605 199603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARI

DAFTAR ISIII

BAB I1

PENDAHULUAN1

 1.1 Latar Belakang1

 1.2 Landasan Hukum1

 1.3 Maksud dan Tujuan2

 1.4 Sistematika Penulisan3

BAB II4

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU4

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.4

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.8

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah10

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD11

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.20

BAB III26

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAEAH26

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional26

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah27

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH28

 4.1 Program dan Kegiatan28

BAB V35

PENUTUP35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja OPD atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Muara Wis secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Muara Wis menyusun Renja OPD Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Wis. Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2024 mengacu pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kecamatan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini adalah Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Muara Wis selama tahun 2024 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah untuk Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Muara Wis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Kantor Camat Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana Tindak Lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi anggaran Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Muara Wis Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN MUARA WIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	Urusan Kewilayaan									
7.01	Urusan Kecamatan									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	61,00	61,00	74,90	122,79	62,00	62,00	40,00
7.01.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana,anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95	14	14	14	100	13	27	28,42
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2	2	2	100	2	4	40,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5	1	1	1	100	1	2	40,00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1	100	1	2	40,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	5	2	2	2	100	1	3	60,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	4	4	4	100	5	9	45,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	20	4	4	4	100	3	7	35,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	100	20	20	20	100	20	40	40,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	180	33	33	33	100	33	66	36,67
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100	1	2	40,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	18	18	18	100	13	31	34,44
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	80	16	16	16	100	16	32	40,00
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	20	4	4	4	100	4	8	40,00

7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	12	12	12	100	12	24	40,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	165	33	33	33	100	33	66	40,00
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25	3	3	3	100	3	6	24,00
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	165	33	33	33	100	33	66	40,00
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165	33	33	33	100	33	66	40,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	40	8	8	8	100	8	16	40,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25	8	8	8	100	5	13	52,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	75	15	15	15	100	20	35	46,67
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30	40	40	40	100	6	46	153,33
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	75	16	16	16	100	15	31	41,33
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10	3	3	3	100	8	11	110,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10	3	3	3	100	4	7	70,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	120	30	30	30	100	24	54	45,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	2000	400	400	400	100	240	640	32,00
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	600	120	120	120	100	120	240	40,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	300	57	57	57	100	60	117	39,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan	100	13	13	13	100	20	33	33,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	170	39	39	39	100	34	73	42,94
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	25	4	4	4	100	5	9	36,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	5	1	1	1	100	0	1	20,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	12	12	12	100	12	24	40,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	60	12	12	12	100	12	24	40,00
7.01.01.2.05.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	12	12	12	100	12	24	40,00

7.01.01.2.05.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	12	12	12	100	12	24	40,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	344	64	64	64	100	63	127	36,92
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	60	12	12	12	100	12	24	40,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	250	50	50	50	100	50	100	40,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	2	2	2	100	1	3	30,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	10	2	2	2	100	2	4	40,00
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	600	120	120	120	100	12	132	22,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	85	3	3	3	100	12	15	17,65
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	10	2	2	2	100	2	4	40,00
7.01.02.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	750	150	150	150	100	5	155	20,67
7.01.02.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	8	5	5	5	100	1	6	75,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35	7	7	7	100	7	14	40,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa nya	35	7	7	7	100	7	14	40,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi	5	1	1	1	100	1	2	40,00
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	10	2	2	2	100	2	4	40,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Muara Wis sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Wis berdasarkan indikator kinerja sasaran akan disampaikan dengan tabel sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Wis
Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			5	5	5,5	6	2,62	195,09	195,09	6	
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			0	0	0	0	0	0	0	0	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam pasal 126 menerangkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan juga merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Wis berpedoman kepada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan. Yaitu disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Selanjutnya mengenai fungsi diuraikan pada pasal berikutnya yaitu di pasal 4 yang berbunyi Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya menyelenggarakan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Adapun isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD diuraikan sebagai berikut:

- a. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah adalah :
 - 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia serta adanya pemerataan SDM yang berkualitas di setiap OPD/ bagian-bagian dalam OPD sehingga pelaksanaan tugas-tugas dapat dikerjakan secara lebih efektif dan efisien. Kecamatan Muara Wis dalam hal ini melaksanakan pembinaan kepada perangkat desa secara teratur, rapat koordinasi Kepala Desa dan Instansi di wilayah Kecamatan Muara Wis, untuk melaksanakan koordinasi serta meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terutama pada pembangunan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:

- 1) Masih kurangnya jumlah SDM yang profesional di Kecamatan Muara Wis sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan secara efektif dan efisien;
 - 2) Belum maksimalnya sarana dan prasarana kantor;
 - 3) Belum tertibnya pengelolaan arsip kantor;
 - 4) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum;
 - 5) Kurangnya kerjasama dan partisipasi masyarakat luas dan stakeholder terkait yang mengakibatkan kurang maksimalnya pencapaian pelaksanaan kegiatan.
- c. Dampak pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional.
- Visi dan Misi Kepala Daerah mempunyai dampak terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.
- 1) Kurang maksimalnya SDM di Kantor Kecamatan Muara Wis sehingga mempengaruhi kinerja Kecamatan Muara Wis;
 - 2) Kurangnya pemahaman dan kepatuhan aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan sehingga berpengaruh terhadap kedisiplinan dan kinerja aparaturnya;
 - 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum maupun partisipasi pembangunan;
 - 4) Kurangnya kerjasama dengan stakeholder dan masyarakat luas dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian hasil/target kegiatan kurang maksimal.
- e. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 1) Peningkatan Sistem Pelayanan, Teknologi dan Informasi sehingga mempermudah akses dari dan ke masyarakat luas dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
 - 2) Mengoptimalkan pembinaan dan kerjasama antar desa sehingga terdapat kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktifitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Wis serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Muara Wis disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum Perangkat

Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Muara Wis diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 akan kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel. T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Wis

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					KECAMATAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63 Nilai		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63 Nilai		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Perangkat Daerah	12 Dokumen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Perangkat Daerah	12 Dokumen		
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Wis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Wis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30.000.000	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	50.000.000	

07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Wis	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Wis	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	30.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	14 Laporan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	14 Laporan		
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Wis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	372 Orang/bulan	3.897.467.114	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Wis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	372 Orang/bulan	3.778.574.058	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	80.520.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	83.520.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	500 Unit		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	500 Unit		
05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	30.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	30.000.000	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.800.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.800.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	31 Orang		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	31 Orang		
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Muara Wis	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31 Paket	70.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Muara Wis	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	-	
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Muara Wis	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	80.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Muara Wis	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	80.000.000	

11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Wis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Wis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	10 Jenis		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	10 Jenis		
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muara Wis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muara Wis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Wis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.598.146	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Wis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Wis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	45.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Wis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	45.000.000	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Muara Wis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.600.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Muara Wis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.198.146	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5.000.000	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Wis	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	60.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Wis	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	60.000.000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	375.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	290.000.000	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000	
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	80 Unit		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	80 Unit		

02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Wis	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	180.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Wis	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Wis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	58 Unit	250.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Wis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Wis	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1.210.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Wis	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan		
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	294.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	302.400.000	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	251.927.960	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	265.586.528	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	64 Unit		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	64 Unit		
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Wis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	110.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Wis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	110.000.000	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Wis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Wis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	20.000.000	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Muara Wis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	350.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Muara Wis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	330.000.000	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	1. 100 Persen 2. 78,5 persen		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	1. 100 Persen 2. 78,5 persen		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 SPM		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	0 SPM		
02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	-	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Muara Wis	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Kegiatan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Muara Wis	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Kegiatan		
02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	30.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	942.202.000	
03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Laporan	2.025.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Laporan	5.930.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	2 Kegiatan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	2 Kegiatan		
03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Wis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Wis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000	

04	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	50.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	100.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 Persen		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 Persen		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Kegiatan		
01	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan		
04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Muara Wis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	180.000.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Muara Wis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	180.000.000	
08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	20.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	25.000.000	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	71,4 Persen		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	71,4 Persen		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa Yang difasilitasi	7 Desa		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa Yang difasilitasi	7 Desa		
03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Muara Wis	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	85.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Muara Wis	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Dokumen	-	
11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Wis	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	225.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Wis	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	250.000.000	
12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	75.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	75.000.000	
					10.439.813.220					13.304.780.732	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan mempertimbangkan hasil MUSRENBANG mulai tingkat Desa/Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten, responsive terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan.

Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan Perangkat Daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada dimasyarakat khususnya terkait dengan pelayanan kepada masyarakat sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan Forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil MUSRENBANG di Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan OPD Kecamatan Muara Wis, seperti yang tersaji dalam Tabel dibawah ini :

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Wis

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pos Binaan Terpadu (Posbindu) Kecamatan Muara Wis	Belum Tersedianya Gedung Posbindu Sbbn	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sebemban	Jumlah Unit		
2	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pos Binaan Terpadu (Posbindu) Kecamatan Muara Wis	Belum Tersedianya Gedung Posbindu	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sebemban	Jumlah Unit		
3	Pembangunan Gapura di Kecamatan	Belum Terpenuhinya Pembangunan Gapura masuk ke Desa Sebemban	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sebemban	Jumlah Unit		
4	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Dalam rangka mencapai pemerataan pembangunan serta tersedianya sarana dan prasarana jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sebemban	Panjang Jalan		
5	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Muara Wis	Belum Tersedianya Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Muara Wis	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sebemban	Panjang Jalan		
6	Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan Muara Wis	Belum Terpenuhinya Pembangunan Pos Keamanan di Desa Sebemban Kecamatan Muara Wis	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sebemban	Jumlah Unit		
7	Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan Muara Wis	Belum Terpenuhinya Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan Muara Wis	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sebemban	Panjang Jalan		
8	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Muara Wis	Belum Terpenuhinya Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Desa Sebemban dan Dusun Kuyung Kecamatan Muara Wis	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sebemban	Jumlah Unit		
9	Pembangunan Turap Kecamatan Muara Wis	Belum Terpenuhinya Pembangunan Turap Desa Sebemban Kecamatan Muara Wis	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sebemban	Panjang Jalan		
10	Pembangunan Jembatan Kecamatan Muara Wis	Belum Terpenuhinya Jembatan Tani Kelompok Tani Bina Bangun	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sebemban	Jumlah Unit		
11	Pembangunan Saluran Drainase Di kelurahan	Tergenangnya Air Pembangunan parit saluran pembuangan air kantor desa	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lebak Mantan	Panjang Jalan		
12	Pembangunan jembatan di Kelurahan	Tidak Tersedianya Jembatan utk Perluasan Desa	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lebak Mantan	Jumlah Unit		

13	Pembangunan Gapura di Kelurahan	Belum ada Gapura Gang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lebak Mantan	Jumlah Unit		
14	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Memerlukan Rehab banyak papan ulin yang patah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
15	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Memerlukan Rehab banyak papan ulin yang patah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
16	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Memerlukan Rehab banyak papan ulin yang patah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
17	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Memerlukan Rehab banyak papan ulin yang patah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
18	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Memerlukan Rehab banyak papan ulin yang patah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
19	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Memerlukan Rehab banyak papan ulin yang patah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
20	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Memerlukan Rehab banyak papan ulin yang patah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
21	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Memerlukan Rehab banyak papan ulin yang patah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
22	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Memerlukan Rehab banyak papan ulin yang patah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
23	Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Ulin Samping Kuburan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
24	Pembangunan jembatan di Kelurahan	Belum selesainya pembangunan jembatan samping kuburan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Jumlah Unit		
25	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Membutuhkan semenisasi agar tidak gampang rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
26	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Semenisasi Gang. Mantis dibutuhkan agar tidak cepat rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
27	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Diperlukan Rehab Jln. Kakap RT. 002 Karena Rusak Parah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
28	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Diperlukan Rehab Jln. Kakap RT. 003 Karena Rusak Parah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
29	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Diperlukan Rehab Jln. Kakap RT. 004 Karena Rusak Parah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
30	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Diperlukan Rehab Jln. Kakap RT. 005 Karena Rusak Ringan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
31	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Semenisasi Gang. Sepakat Dibutuhkan Agar tidak cepat rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
32	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Semenisasi Gang. Payau Dibutuhkan agar fasilitas masyarakat tidak cepat rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
33	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Semenisasi Gang. Surya Dibutuhkan agar fasilitas masyarakat tidak cepat rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		

34	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Semenisasi Gang. Medis Dibutuhkan agar fasilitas masyarakat tidak cepat rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
35	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Semenisasi Gang. Family Dibutuhkan agar fasilitas masyarakat tidak cepat rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
36	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Semenisasi Gang. Kakap Dibutuhkan agar fasilitas masyarakat tidak cepat rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
37	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Semenisasi Jln. Mesjid Dibutuhkan agar fasilitas masyarakat tidak cepat rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
38	Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Belum selesai pembangunan jembatan ulin Jln. Mesjid II	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
39	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Semenisasi jln. gabus Dibutuhkan agar fasilitas masyarakat tidak cepat rusak	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
40	Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Kelompok Pertanian Bina Marga Membutuhkan akses Jalan untuk menuju lahan pertanian	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
41	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Memerlukan Semenisasi untuk Gang. Perumahan Dinas Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
42	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan	Belum Bisa Aktif Untuk Di Salurkan Kewarga/Masyarakat Alamat Jln.Pasar Desa Rt.02 Desa Muara Enggelam	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Enggelam	Jumlah Unit		
43	Pembangunan Jembatan Kecamatan Muara Wis	Belum Cukup Panjang Jalan Untuk tempat Pembuangan Sampah Rt.03 Jln.Pasar Desa,Desa Muara Enggelam	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Enggelam	Jumlah Unit		
44	Pembangunan Turap Kecamatan Muara Wis	Rawannya Pemukiman Penduduk dari Gelombang Besar Rt.04 Desa Muara Enggelam	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Enggelam	Panjang Jalan		
45	Pembangunan Jembatan Kecamatan Muara Wis	Sarana Dan Prasarana Jalan transportasi Belum Maksimal Rt.01 Jln.Balai Desa,Desa Muara Enggelam	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Enggelam	Jumlah Unit		
46	Pembangunan Jembatan Kecamatan Muara Wis	Sulitnya akses Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Enggelam	Jumlah Unit		
47	Pembangunan Jalan Kecamatan Muara Wis	Masih rusaknya jalan darat antara dusun ketibeh dan desa enggelam	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Enggelam	Panjang Jalan		
48	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan	Tidak adanya sarana dan prasarana air bersih baik di desa maupun didusun	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Enggelam	Jumlah Unit		
49	Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum/Komunal Kecamatan	Kurangnya Mck di desa kami, sehingga masyarakat masih buang air ke sungai	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Enggelam	Jumlah Unit		
50	Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Membutuhkan pembangunan jembatan ulin untuk menunjang fasilitas dan aktifitas petugas puskesmas	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
51	Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Membutuhkan Titik Pembelokan Mobil	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		

52	Pembangunan Jalan Kecamatan Muara Wis	Kurangnya Akses Jalan Yang Tidak Memadai dari Desa Melintang Menuju Desa Sebanban Dan Ke Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Melintang	Panjang Jalan		
53	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Posyandu Kecamatan Muara Wis	Kurangnya Bangunan Sarana dan Prasarana Posyandu Lansia untuk Kesehatan Di Desa Melintang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Melintang	Panjang Jalan		
54	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Posyandu Kecamatan Muara Wis	Kurangnya Bangunan Sarana Dan Prasarana Posyandu Dan Posbindu untuk kesehatan Di Desa Melintang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Melintang	Panjang Jalan		
55	Pembangunan Jalan Kecamatan Muara Wis	Kurangnya Akses Jalan Menuju Kecamatan yang jalan di samping tambak tidak memadai di Desa Melintang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Melintang	Panjang Jalan		
56	Pembangunan Jalan Kecamatan Muara Wis	Kurangnya Akses Jalan Di Desa Melintang untuk Jembatan Penyebrangan RT 05 Menuju RT 10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Melintang	Panjang Jalan		
57	Pembangunan Jalan Kecamatan Muara Wis	Kurangnya Akses Jalan Yang Tidak Memadai Di Jalan Sangga Aren Desa Melintang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Melintang	Panjang Jalan		
58	Pembangunan Gapura di Kecamatan	Belum adanya Gapura Berciri khas Pariwisata	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Enggelam	Jumlah Unit		
59	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Kondisi Jalan Jembatan Ulin Rusak dan Lantai jembatan patah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
60	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Kondisi Jalan Jembatan Ulin Rusak dan Lantai jembatan patah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
61	Pembangunan Jalan Kecamatan Muara Wis	Kurangnya akses jalan jembatan penyebrangan di desa melintang rt 14 ke 15	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Melintang	Panjang Jalan		
62	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Kondisi Jalan yang Hampir setiap Tahunnya diperbaiki karena lantai yang patah dan bahan utamanya semakin langka	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
63	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Kondisi Jalan yang Hampir setiap Tahunnya diperbaiki karena lantai yang patah dan bahan utamanya semakin langka	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
64	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Kondisi Jalan yang Hampir setiap Tahunnya diperbaiki karena lantai yang patah dan bahan utamanya semakin langka	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
65	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Kondisi Jalan yang Hampir setiap Tahunnya diperbaiki karena lantai yang patah dan bahan utamanya semakin langka	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
66	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Muara Wis	Akses jalan masyarakat/warga beraktifitas berlalulang rusak parah pada musim penghujan jalannya becek dan licin sangat berbahaya dilewati masyarakat/warga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lebak Cilong	Panjang Jalan		
67	Pembangunan Gapura di Kecamatan	Dengan Harapan Agar terciptanya Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dilingkungan Desa Lebak Cilong	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lebak Cilong	Jumlah Unit		

68	Pembuatan dan Pemeliharaan Taman dalam wilayah Kecamatan	Perlunya taman penghijauan untuk tempat bersantai	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lebak Cilog	Jumlah Unit		
69	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan	Minimnya jaringan intalasi air ke rumah warga yang kurang mampu	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lebak Cilog	Jumlah Unit		
70	Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan Muara Wis	Rehab Jembatan Ulin RT. 04 Desa Muara Wis Kec. Muara Wis	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
71	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Muara Wis	Pengerasan Badan Jalan Kelompok Tani Karya Bersama	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
72	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Muara Wis	Pengerasan Badan Jalan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
73	Pembangunan Jalan Kecamatan Muara Wis	Pembangunan Jalan Rapak Sakka	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
74	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Muara Wis	Semenisasi Jalan Kartanegara	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
75	Pembangunan Turap Kecamatan Muara Wis	Pembangunan Turap	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
76	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Kecamatan Muara Wis	Pembangunan Gorong - Gorong Kelompok Tani Karya Harapan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
77	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Kecamatan Muara Wis	Pembangunan Gorong - Gorong	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
78	Pembangunan Jembatan Kecamatan Muara Wis	Pembangunan Jembatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Jumlah Unit		
79	Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan Muara Wis	Pelebaran Jembatan Gang Mesjid	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
80	Pembangunan Turap Kecamatan Muara Wis	Pembangunan Turap	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
81	Pembangunan Jalan Kecamatan Muara Wis	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelompok Tani Ingin Maju	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
82	Pembangunan Jembatan Kecamatan Muara Wis	Pembangunan Jembatan Kelompok Tani Karya Harapan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
83	Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan Muara Wis	Lanjutan Jembatan Kuburan Muslimin Titian Ulin RT.01 Desa Muara Wis	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
84	Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan Muara Wis	Lanjutan Semenisasi Jalan Jembatan Ulin RT.02 Desa Muara Wis	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
85	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Muara Wis	Semenisasi Jalan Poros	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		
86	Pembangunan Jembatan Kecamatan Muara Wis	Pembangunan Jembatan Dan Gorong - Gorong Jalan Poros Seberman	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Panjang Jalan		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAEAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai mana diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 merupakan RPJMD Keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 – 2025. Oleh sebab itu penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara masa bakti tahun 2021 – 2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 -2025 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 tahun 2010 tentang RPJPD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dok perencanaan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan Penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan daerah.

RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan RPKD, yang merupakan Rencana Pembangunan tahunan daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal , serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam Priode 2021 – 2026 adalah :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
- 2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
- 3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
- 5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dijabarkan kembali kedalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkam dalam Renja Kecamatan. Maka untuk itu Tujuan strategis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah sebagai berikut :**“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel”**

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kurtai Kartanegara Tahun 2024 adalah : **“Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan”**

Tabel 3.1
Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Kecamatan Muara Wis merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Muara Wis sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Muara Wis diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Muara Wis merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

2) Pencapaian SPM.

Standar Pelayanan Minimal di Kecamatan Muara Wis belum terlaksana, sehingga perlu dimasukan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian SPM di Kecamatan Muara Wis.

B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:

1) Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Muara Wis Tahun 2024 adalah 6 Program dengan 14 Kegiatan dan 41 sub kegiatan.

2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Muara Wis sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Muara Wis dan melingkupi semua Desa.

3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Renja Kecamatan Muara Wis sebesar Rp. 10.908.673.788,00.

C. Tabel rencana program dan kegiatan sebagaimana table berikut ini:

Tabel. T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Wis

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				UNSUR KEWILAYAHAN								
01				KECAMATAN								
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		63 Nilai		APBD		63 Nilai	
01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Perangkat Daerah		12 Dokumen		APBD		12 Dokumen	
01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Wis	2 Dokumen	30.000.000	APBD		2 Dokumen	30.000.000
01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Wis	1 Dokumen	15.000.000	APBD		1 Dokumen	15.000.000
01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muara Wis	1 Dokumen	15.000.000	APBD		1 Dokumen	15.000.000
01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Wis	6 Laporan	50.000.000	APBD		5 Laporan	50.000.000
01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Wis	3 Laporan	30.000.000	APBD		3 Laporan	30.000.000

01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		14 Laporan		APBD		14 Laporan	
01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Wis	372 Orang/bulan	3.778.574.058	APBD		31 Orang	3.897.467.114
01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Wis	1 Laporan	15.000.000	APBD		1 Laporan	15.000.000
01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Muara Wis	14 Laporan	83.520.000	APBD		14 Laporan	83.520.000
01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan		500 Unit		APBD		500 Unit	
01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	4 Laporan	30.000.000	APBD		4 Laporan	30.000.000
01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	1 Laporan	40.800.000	APBD		1 Laporan	40.800.000
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian		31 Orang		APBD		31 Orang	
01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Muara Wis	0 Paket	-	APBD		31 Paket	70.000.000
01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Muara Wis	8 Orang	80.000.000	APBD		8 Orang	80.000.000
01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Wis	31 Orang	30.000.000	APBD		31 Orang	30.000.000
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia		10 Jenis		APBD		10 Jenis	
01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Muara Wis	1 Paket	7.500.000	APBD		1 Paket	7.500.000

01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Muara Wis	1 Paket	25.000.000	APBD		1 Paket	40.598.146
01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Muara Wis	2 Paket	45.000.000	APBD		2 Paket	45.000.000
01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Muara Wis	2 Paket	14.198.146	APBD		2 Paket	8.600.000
01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Muara Wis	5 Dokumen	5.000.000	APBD		8 Dokumen	8.000.000
01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Wis	12 Laporan	60.000.000	APBD		12 Laporan	60.000.000
01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Wis	240 Laporan	290.000.000	APBD		240 Laporan	375.000.000
01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Wis	12 Dokumen	50.000.000	APBD		12 Dokumen	50.000.000
01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Muara Wis	1 Dokumen	30.000.000	APBD		1 Dokumen	30.000.000
01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan		80 Unit		APBD		80 Unit	
01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Muara Wis	0 Unit	-	APBD		1 Unit	180.000.000
01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Muara Wis	0 Unit	-	APBD		58 Unit	250.000.000
01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Muara Wis	0 Unit	-	APBD		6 Unit	1.210.000.000
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan		APBD		12 Bulan	
01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Wis	1 Laporan	5.000.000	APBD		1 Laporan	5.000.000
01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Muara Wis	12 Laporan	302.400.000	APBD		12 Laporan	294.400.000
01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Muara Wis	12 Laporan	265.586.528	APBD		12 Laporan	251.927.960

01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		64 Unit		APBD		64 Unit	
01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Muara Wis	15 Unit	110.000.000	APBD		15 Unit	110.000.000
01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Muara Wis	50 Unit	20.000.000	APBD		50 Unit	20.000.000
01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Muara Wis	2 Unit	330.000.000	APBD		2 Unit	350.000.000
01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan		1. 100 Persen 2. 78,5 persen		APBD		1. 100 Persen 2. 78,5 persen	
01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Muara Wis	0 SPM		APBD		1 SPM	
01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	0 Laporan	-	APBD		1 Laporan	10.000.000
01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Muara Wis	2 Kegiatan		APBD		2 Kegiatan	
01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Muara Wis	12 Laporan	942.202.000	APBD		12 Laporan	30.000.000
01	02	2.04	04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	10 Laporan	5.930.000.000	APBD		10 Laporan	2.025.000.000
01	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		100 Persen		APBD		100 Persen	
01	02	2.04		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan		2 Kegiatan		APBD		2 Kegiatan	
01	02	2.04	03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Wis	4 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000	APBD		4 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000

01	02	2.04	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	2 Laporan	100.000.000	APBD		2 Laporan	50.000.000
01	03			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		100 Persen		APBD		100 Persen	
01	03	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		0 Kegiatan		APBD		1 Kegiatan	
01	03	2.01	01	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Muara Wis	0 Laporan	-	APBD		1 Laporan	10.000.000
01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 Persen		APBD		100 Persen	
01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan		2 Kegiatan		APBD		2 Kegiatan	
01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Muara Wis	150 Orang	180.000.000	APBD		150 Orang	180.000.000
01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Wis	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000
01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik		71,4 Persen		APBD		71,4 Persen	
01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi		7 Desa		APBD		7 Desa	
01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Muara Wis	0 Dokumen	-	APBD		7 Dokumen	85.000.000

01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Wis	1 Dokumen	250.000.000	APBD		1 Dokumen	225.000.000
01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Wis	2 Dokumen	75.000.000	APBD		2 Dokumen	75.000.000
								13.304.780.732				10.442.813.220

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Wis Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Wis Tahun 2022-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Wis yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Muara Wis.

Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan Muara Wis berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Wis Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Kecamatan Muara Wis berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Muara Wis Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Wis selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Muara Wis. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Muara Wis juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Kecamatan Muara Wis ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Muara Wis serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Muara Wis, Agustus 2023

Camat Muara Wis



FADHLI ANNUR, S.Pd
NIP. 197106051996031004